



# LAPORAN KINERJA

**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan  
Kawasan Permukiman  
Kabupaten Bantul**

**TAHUN 2020**





LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2020

DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANTUL



## Kata Pengantar

---



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, 29 Januari 2021

Kepala



Bobot Ariffi' Aidin, ST., MT.

NIP. 19690619 1996 03 1 003

## Ikhtisar Eksekutif

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima IKU, disimpulkan bahwa kelima indikator ber kriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 97,81%. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik.
3. Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani.
4. Persentase kecukupan air irigasi.
5. Persentase penanganan banjir.



Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima IKU, disimpulkan bahwa kelima indikator berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100,98%. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik.
3. Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani.

4. Persentase kecukupan air irigasi.
5. Persentase penanganan banjir.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiv
Bab I    Pendahuluan.....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Pembentukan OPD.....	2
C.    Susunan Organisasi.....	3
D.    Keragaman SDM.....	5
E.    Isu Strategis.....	7
Bab II    Perencanaan Kinerja.....	11
A.    Rencana Strategis.....	11
B.    Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	20
C.    Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	25
Bab III    Akuntabilitas Kinerja.....	27
A.    Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	28
B.    Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
C.    Akuntabilitas Anggaran.....	63
D.    Efisiensi Sumber Daya.....	66
Bab IV    Penutup.....	69

## Daftar Tabel

---

Tabel 1.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2020.....	6
Tabel 2.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020.....	6
Tabel 3.	Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP.....	7
Tabel 4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja.....	15
Tabel 5.	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Akhir Renstra.....	16
Tabel 6.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	17
Tabel 7.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	22
Tabel 9.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	25
Tabel 10.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	29
Tabel 12.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik.....	31
Tabel 13.	Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2020.....	32

Tabel 14.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi .....	35
Tabel 15.	Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2020.....	36
Tabel 16.	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2020 .....	40
Tabel 17.	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2020 .....	41
Tabel 18.	Lokasi Pemasangan Papan Larangan Tahun 2020.....	44
Tabel 19.	Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2020 .....	45
Tabel 20.	Data Kawasan Kumuh sesuai Hasil Identifikasi Tahun 2020	46
Tabel 21.	Data Kondisi Jalan Desa Tahun 2020 .....	48
Tabel 22.	Data Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Perumahan.....	49
Tabel 23.	Data Penanganan RTLH Tahun 2020.....	50
Tabel 24.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rusunawa dan Pengolahan.....	51
Tabel 25.	Lokasi Pembangunan saluran drainase/air hujan Tahun 2020 .....	53
Tabel 26.	Lokasi Pemeliharaan Saluran Drainase Tahun 2020 .....	54
Tabel 27.	Lokasi Pembangunan Jalan Desa Tahun 2020 .....	56
Tabel 28.	Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2020 .....	59
Tabel 29.	Lokasi Peningkatan Afvour Tahun 2020 .....	60
Tabel 30.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020 .....	64
Tabel 31.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	66
Tabel 32.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 ..	68

# Daftar Gambar

---

Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul .....	4
Gambar 2. Foto 0% dan 100% Peningkatan Jalan Tahun 2020.....	33
Gambar 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tegal.....	38



# Bab I Pendahuluan

---

## ***Bab I Pendahuluan***

### ***berisi :***

- a. Latar Belakang*
- b. Pembentukan OPD*
- c. Susunan Organisasi*
- d. Keragaman SDM*
- e. Isu Strategis*

### A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPUPKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

## B. Pembentukan OPD

DPUPKP merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPUPKP menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

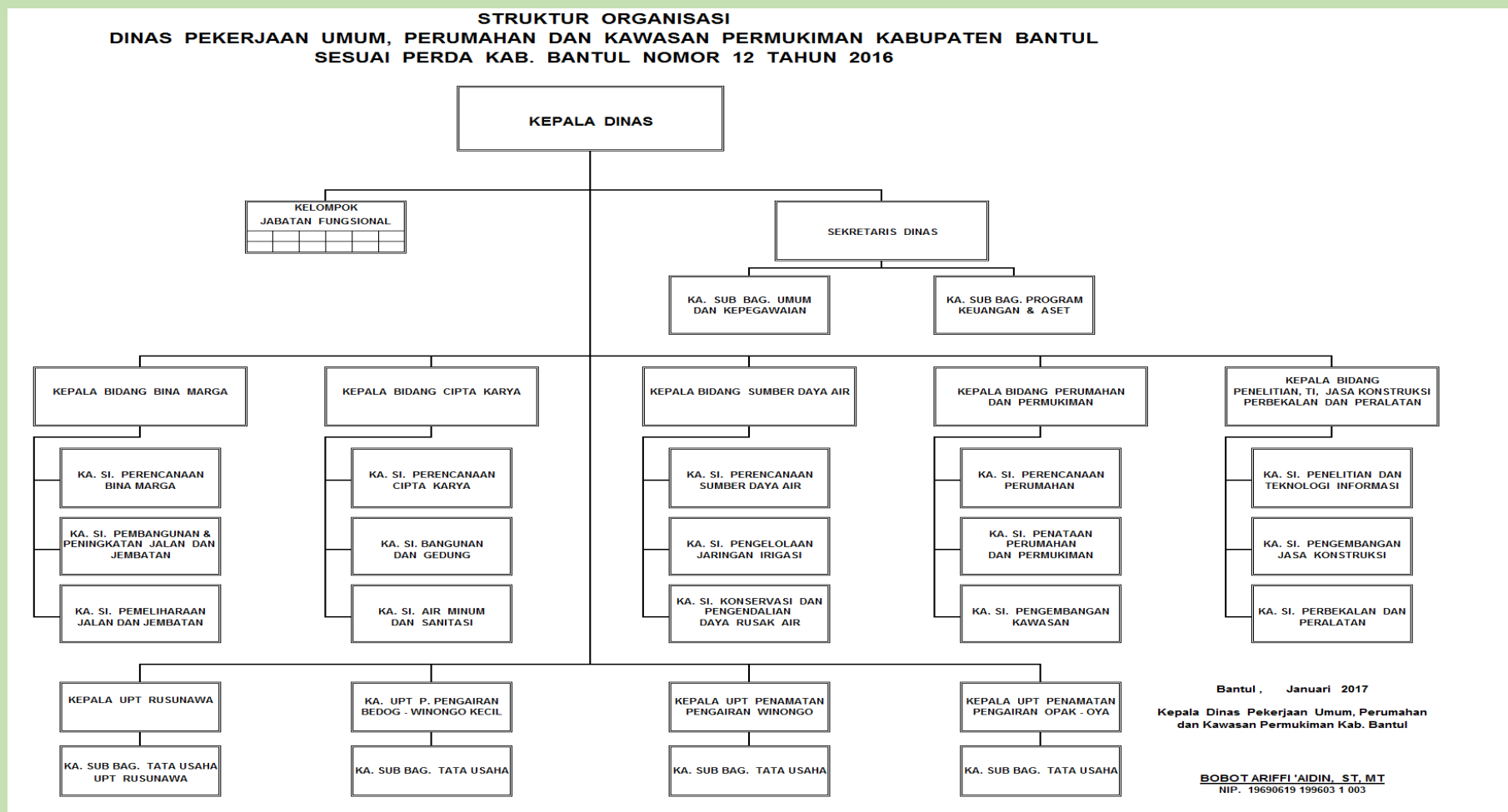
### C. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Sumber Daya Air;
6. Bidang Perumahan dan Permukiman;
7. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;
8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas PUPKP dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**Gambar 1.** Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul



#### D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan survai lapangan, perencanaan DED, pengawasan pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan dokumen rencana, evaluasi dan laporan implementasi secara tepat dan cepat sesuai kurun waktunya. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020 ada 111 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2020

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan			
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV
105	94	11	6	44	45	11

Sumber: DPUPKP, 2021

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan						
	SD	SMP	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
105	6	9	54	4	4	15	18

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	31	4	15	11	1
Bidang Bina Marga	12	1	3	7	1
Bidang Cipta Karya	7	-	2	3	2
Bidang Sumber Daya Air	12	-	5	4	3
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	-	2	5	0
Bidang Lit,TI, Jakon dan Alkal	12	-	3	7	2
UPT Pengamatan Pengairan BWK	5	-	3	2	-
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	5	1	2	2	-
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	8	-	7	1	
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	-	1	1	1
Arsiparis/JFT	2	-	1	1	-
Total	105	6	43	45	11

Sumber: DPUPKP, 2021

#### E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PUPKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

#### Isu Strategis Bidang Bina Marga

1. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
2. Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas jalan menuju/dari lokasi pengambilan galian C.
3. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir, kawasan budaya, wisata serta sentra-sentra industri.

#### Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah.



2. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah sebagai bagian dari upaya merealisasikan *good governance*
3. Pengelolaan drainase lingkungan dengan memberdayakan masyarakat

#### Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

1. Peningkatan pelayanan kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan
2. Perlindungan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sektor strategis lainnya dari ancaman banjir
3. Pengelolaan bahan galian golongan C, air baku melalui pengurusan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penggunaan air baku dan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

#### Isu Strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Beberapa

permasalahan terkait urusan perumahan permukiman yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah:

1. Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik
2. Masih terdapat beberapa wilayah/kawasan yang masuk dalam kategori kumuh
3. Masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH).

Isu Strategis Bidang Penelitian Teknonolgi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan

1. Perlunya perangkat keras dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyediaan data dan informasi secara komprehensif dan *up to date*
2. Peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi
3. Perlunya pengadaan alat-alat berat yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### ***Bab II Perencanaan Kinerja berisi :***

*a. Rencana Strategis*

*b. Perjanjian Kinerja*

*c. Program Untuk Pencapaian Sasaran*

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi

Pemerintah Kabupaten Bantul yang dicanangkan, adalah:

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.*

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana".

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)
			Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)
		Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi (%)
		Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh (%) perkotaan yang tertangani
	Menciptakan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir (%)

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2020 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Satuan	Target Tahun 2020	Target Akhir 2021
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	75,58	76,08
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	84	84
2.	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	%	82,66	83,16
3.	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	100	100
4.	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir	%	40,9	47,68

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan



sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan layanan infrastruktur publik yang berkualitas dan memadai	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan
		Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah
	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Melaksanakan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi, dan pembangunan	Peningkatan pelayanan kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		bangunan pelengkap	jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan
	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat	Penyelenggaraan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
Menciptakan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya penanganan banjir	Melakukan pengurangan resiko bencana melalui pemeliharaan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan sarana prasarana pengendali bencana	Perlindungan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sektor strategis lainnya dari ancaman banjir

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
6. Program pengelolaan areal pemakaman
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
12. Program Pengendalian Banjir
13. Program Pembangunan Gedung
14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
15. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
16. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
17. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*)

berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
2	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi
3	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani
4	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir

Sumber: DPUPKP, 2021

#### B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020


Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id),

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobot Ariffi 'Aidin, ST, MT  
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. Suharsono  
 Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bantul, 8 Januari 2020

Pihak Kedua



Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama



Bobot Ariffi 'Aidin, ST, MT  
 NIP. 19690619 199603 1 003

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan  
Kawasan Permukiman

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	75,58	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75,58
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	84	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	84
2	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100
3	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	Persen	82,66	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	82,66
4	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir	Persen	40,9	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	40,9

Program	Anggaran
1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 129.822.842.000
2. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong	Rp. 11.246.300.000
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp. 293.696.000
4. Program Pembangunan Gedung	Rp. 7.723.350.000

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	888.842.500
6. Program Pengembangan Perumahan	Rp.	4.086.947.000
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.	78.300.000
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp.	22.994.071.000
9. Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp.	557.800.000
10. Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Rp.	29.367.692.431
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp.	14.046.447.200
12. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp.	1.126.630.000
13. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	55.125.000
14. Program Pengendalian Banjir	Rp.	13.594.875.000
15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	4.889.663.000
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.248.100.000
17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	407.825.000
Jumlah		Rp. 242.428.506.131

Bantul, 8 Januari 2020

Pihak Kedua.



Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama,



Bobot Aniffi' Aidin, ST, MT  
NIP. 19690619 199603 1 003



### C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 9. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>2. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan</li> <li>3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</li> <li>4. Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>5. Program Pembangunan Gedung</li> </ol>
2.	Meningkatnya kecukupan air irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> <li>2. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</li> <li>3. Program penyediaan dan pengelolaan air baku</li> <li>4. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</li> <li>5. Program pembangunan dan</li> </ol>

		rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/gorong-gorong
3.	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan perumahan</li> <li>2. Program pengelolaan areal pemakaman</li> <li>6. Program lingkungan sehat perumahan</li> </ol>
4.	Meningkatnya penanganan banjir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengendalian banjir</li> </ol>

Sumber: DPUPKP, 2021

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

### ***Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :***

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama***
- b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja***
- c. Akuntabilitas Anggaran***
- d. Efisiensi Sumberdaya***

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman

kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2017

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	75,10	75,58	75,42	99,79	76,08	99,13
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	84	82	84	100	84	100
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	82,19	82,66	80,01	96,79	83,16	96,21
4	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	92,49	100	92,49	92,49	100	92,49
5	Persentase	34	40,9	40,9	100	47,68	86,64

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	penanganan banjir (%)						

Sumber : DPUPKP, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 98,014%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

### 1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Terdapat dua indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik seperti pada tabel di bawah.

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75,10	75,58	75,42	99,79	76,08	99,13
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	84	82	84	100	84	100

Sumber : DPUPKP, 2021

#### Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 75,58%, realisasi sebesar 75,42%, tercapai 99,79% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 75,10% maka capaian tahun 2020 naik sebesar 0,32%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 76,08%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbang 99,13% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2020 sepanjang 471 km atau 75,42% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 153,47 km atau 24,58 % dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km. Sedangkan kondisi jalan perdesaan sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.

Tabel 13. Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2020

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Aspal	624,47	471	75,42	153,47	24,58

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan agar fungsi jalan menjadi optimal. Indikator kinerja program ini adalah penanganan jalan kabupaten dengan indikator program panjang jalan kabupaten tertangani. Target tahun 2020 sepanjang 17 km, tertangani 13,5km atau 79,41%. Program ini didukung kegiatan:



- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan keluaran berupa pemeliharaan rutin jalan kabupaten sebanyak 30 ruas dengan panjang 124,38 km
  - b. Peningkatan jalan kabupaten sepanjang 13,5 km pada 17 ruas jalan.
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Indikator kinerja program ini adalah tertanganinya drainase jalan kabupaten, dengan formulasi panjang drainase tertangani dengan target 500m. Capaian pada tahun 2020 berhasil tertangani 376m. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sebanyak 6 ruas.



Gambar 2. Foto 0% dan 100% Peningkatan Jalan Tahun 2020

#### Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya

masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 84%, realisasi sebesar 84%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini sama dengan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 84%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 84%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Pembangunan Gedung. Dari 53 (lima puluh tiga) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 9 (sembilan) gedung dengan kondisi sedang dan 44 (empat puluh empat) atau 84% gedung kantor dengan kondisi baik. Dengan terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

## 2. Sasaran 2: Meningkatnya kecukupan air irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran

pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman. Indikator kinerja sasaran ini adalah:

#### Persentase kecukupan air irigasi

Kinerja dari indikator ini untuk mengukur luas daerah irigasi yang dapat terairi dengan baik dibagi jumlah luas daerah irigasi x 100%. Capaian tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 14. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kecukupan air irigasi (%)	82,19	82,66	80,01	96,79	83,16	96,21

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 82,66%, realisasi sebesar 80,01%, tercapai 96,79% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 82,19% maka capaian tahun 2020 turun sebesar 2,18%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 83,16%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 96,21% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 82,66% (7,136,86Ha) dan terealisasi sebesar

80,01% (6.908,06Ha) atau tercapai sebesar 96,79%. Data target dan capaian DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 15. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
<b>2016</b>	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
<b>2017</b>	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
<b>2018</b>	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
<b>2019</b>	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
<b>2020</b>	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: DPUPKP, 2020

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, serta Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

a). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengembangan dan perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp433.255.000,- terealisasi sebesar Rp.390.319.000,- atau tercapai 90,09% dengan efisiensi sebesar Rp42.936.000,-. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (a) Penyusunan DED Talang DI Tegal Kiri di Sungai Oyo
- (b) Penyusunan Indek Kinerja Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul
- (c) Pengelolaan Aset Irigasi tahap II di Kabupaten Bantul
- (d) Pembuatan Pemetaan Daerah Rawan Banjir Kabupaten Bantul
- (e) Update data daerah irigasi Kabupaten Bantul padal aplikasi ePaksi
- (f) Kajian Analisis Standar Harga Konstruksi Bidang Sumber Daya Air

- 2) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp8.899.495.000,- terealisasi sebesar Rp7.674.614.726,- atau tercapai 86,24% dengan efisiensi sebesar Rp1.224.880.274,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(a) Peningkatan/rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) :

- Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) sebanyak 6 DI (DI. Karang, DI. Klegen, DI. Pacar, DI. Jotawang Kanan, DI. Sumberan dan DI. Balong).
- Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 6 Daerah Irigasi melalui sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) (DI. Tegal, DI. Mojo, DI. Sambeng, DI. Pranti II, DI. Sorogenen, DI. Titang)
- Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 6 DI yaitu DI. Karangjati, DI Wonosari, DI. Ngaglik, DI. Ngreboh, DI. Talok, dan DI. Colo



Gambar 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tegal

(b) Rehabilitasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Bangunan Ukur dan Pielschale di DI. Pacar Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu

(c) Rehabilitasi Gorong-Gorong pada lokasi:

1. Gorong-Gorong Kali Putih, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon

2. Gorong-Gorong DI. Jotawang, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon
3. Gorong-Gorong Jetis Tempel, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro
4. Gorong-Gorong DI. Kepuh Kulon, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan

(d) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air pada lokasi:

1. Pintu Bagi Afvour Buntung Kanan
2. Pintu Penguras Bendung Kemiri
3. Pintu Intake Bendung Kemiri
4. Pintu Intake Bendung Timbulsari
5. Pintu Intake Bendung Bibis Donoloyo
6. Pintu Intake Bendung Sindet
7. Pintu Penguras Bendung Ketonggo Bibis
8. Pintu Penguras Bendung Sikluwih no. 2
9. Pintu Penguras Bendung Sikluwih No. 6
10. Pintu Penguras Bendung Pranti II

(e) Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 16. Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2020

No	Kapanewon	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1	Pundong	Daerah Irigasi Klegen Kal. Panjangrejo, Daerah Irigasi Tegal Kal. Panjangrejo
2	Bambanglipuro	Daerah Irigasi Mejing Kal. Sumbermulyo
3	Pandak	Daerah Irigasi Ewon Kal. Gilangharjo, Daerah Irigasi Kadisono Kal. Gilangharjo
4	Pajangan	Daerah Irigasi Widodo Kal. Triwidadi
5	Bantul	Daerah Irigasi Merdiko Kal. Bantul
6	Dlingo	Daerah Irigasi Sambeng Kal. Jatimulyo
7	Banguntapan	Daerah Irigasi Donoloyo Kal. Tamanan
8	Piyungan	Daerah Irigasi Kertopaten Kal. Baturetno
9	Sewon	Daerah Irigasi Timbulsari Kal. Timbulharjo, Daerah Irigasi Kemiri Kal. Timbulharjo Daerah Irigasi Miri Kal. Panggungharjo
10	Kasihan	Daerah Irigasi Bayem Kal. Ngestiharjo

3) Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pada UPTD Pengamatan Pengairan Bedog dan Winongo Kecil, Opak Oyo, dan Winongo. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp354.460.000,- terealisasi sebesar Rp347.292.100,- atau tercapai 97,98% dengan efisiensi sebesar Rp7.167.900,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (a) Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi berupa gali sedimen, pembersihan rumput dan tanaman liar pada saluran irigasi:



**Tabel 17.** Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2020

No	Kapanewon	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1	Kretek	Daerah Irigasi Sikluwih Kal. Donotirto Daerah Irigasi Sono Kal. Parangtritis
2	Pundong	Daerah irigasi Klegen Kal. Panjangrejo
3	Bambanglipuro	Daerah Irigasi Mejing Kal. Sidomulyo
4	Pajangan	Daerah Irigasi Kadisono Kal. Guwosari
5	Bantul	Daerah Irigasi Gempolan Kal. Trirenggo
6	Imogiri	Daerah Irigasi Canden Kal. Kebonagung Daerah Irigasi Kajor Kal. Selopamioro Daerah Irigasi Sindet Kal. Imogiri Daerah Irigasi Tegal Kal. Sriharjo
7	Banguntapan	Daerah Irigasi Bibis Donoloyo, Kal. Tamanan Daerah Irigasi Grojogan Kal. Wirokerten Daerah Irigasi Kuncen Kal. Baturetno Daerah Irigasi Ngori Kal. Wirokerten Daerah Irigasi Salakan Kal. Jambidan Daerah Irigasi Semerangan Kal. Wirokerten Daerah Irigasi Wiyoro Kal. Baturetno
8	Pleret	Daerah Irigasi Karangploso Kal. Bawuran Daerah Irigasi Pacar Kal. Wonokromo Daerah Irigasi Pandes Kal. Wonokromo
9	Piyungan	Daerah Irigasi Pranti II Kal. Srimulyo
10	Sewon	Daerah Irigasi Merdiko Kal. Timbulharjo Daerah Irigasi Siraman Kal. Panggungharjo Daerah Irigasi Timbulsari Kal. Timbulharjo Daerah Irigasi Dokaran Kal. Bangunharjo
11	Kasihan	Daerah Irigasi Tengah Kal. Bangunjiwo Daerah Irigasi Bayem Kal. Ngestiharjo Daerah Irigasi Kenalan Kal. Bangunjiwo Daerah Irigasi Sumberan Kal. Ngestiharjo

(b) Pengelolaan bendung untuk penyediaan air irigasi bagi

petani dilakukan pada 100 Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul

(c) Pengelolaan dan kesiapsiagaan bendung air pada musim hujan pada:

- Bendung Klegen
- Bendung Mejing
- Bendung Ketonggo Bibis

b). Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk menyediakan dan mengelola sumber air baku bagi masyarakat. Adapun tujuan program adalah melakukan pemeliharaan terhadap prasarana air baku berupa sumur bor. Anggaran program ini Rp55.125.000,- terealisasi sebesar Rp50.657.000,- atau tercapai 91,89%.

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan prasarana penyediaan air baku yaitu pemeliharaan sumur bor Kal. Jatimulyo dan Kal. Terong, Kapanewon Dlingo. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp55.125.000,- terealisasi sebesar Rp50.657.000,- atau tercapai 91,89% dengan efisiensi sebesar Rp4.468.000,-

c). Program Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Maksud program ini adalah untuk melakukan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air, sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk melakukan pemeliharaan bangunan penampung air serta melakukan

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber day air. Anggaran program ini sebesar Rp1.071.455.000,- terealisasi sebesar Rp1.047.505.500,- atau tercapai 97,76%.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan embung dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.037.825.000,- terealisasi sebesar Rp1.015.097.500,- atau tercapai 97,81% dengan efisiensi sebesar Rp22.727.500,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya dengan output kegiatan berupa :

- (a) Pembangunan Penampung Air Badegan, Kapanewon Bantul
- (b) Pembangunan Penampung air Kersan, Kapanewon Pajangan
- (c) Pembangunan Penampung air Senet, Kapanewon Dlingo
- (d) Pembangunan Penampung air Grengseng, Kapanewon Dlingo dan
- (e) Pembangunan Penampung air Petung, Kapanewon Dlingo.

- 2) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.630.000,- terealisasi sebesar Rp32.408.000,- atau tercapai 96,37%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan output kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan rambu larangan sebanyak 28 unit, dengan rincian lokasi seperti pada Tabel 18.

**Tabel 18.** Lokasi Pemasangan Papan Larangan Tahun 2020

No	Kapanewon	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1	Kretek	Dusun Gadingharjo dan Tegalsari, Kal. Donotirto
2	Pundong	Dusun Klegen, Kal. Panjangrejo 2 lokasi di Dusun Piring, Dusun Klisat Kal. Srihardono
3	Bambanglipuro	Dusun Mejing, Kal. Mulyodadi
4	Pandak	Dusun Banyudono dan Bajang, Kal. Gilangharjo Kal. Wijirejo
5	Bantul	Kal. Ringinharjo Dusun Code, Kal. Sabdodadi
6	Jetis	Dusun Bakulan Wetan dan Sulang Kidul Kal. Patalan Dusun Gaten, Kal. Canden
7	Pleret	Dusun Karanganom dan Jati, Kal. Wonokromo
8	Piyungan	Dusun Nganyang, Kal. Sitimulyo
9	Banguntapan	Dusun Glondong, Kal. Wiroketen
10	Sewon	2 lokasi di Dusun Gatak, Kal. Timbulharjo Dusun Geneng, Kal. Panggunharjo Dusun Semail, Kal. Bangunharjo
11	Kasih	Dusun Gedongan, Bangunjiwo Dusun Sonosewu, Cobongan, Cungkuk dan Sonopakis Kidul Kal. Ngestiharjo

## 3. Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat

## Persentase kawasan kumuh Perkotaan yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2020 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Tabel 19. Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	92,49	100	92,49	92,49	100	92,49

Capaian indikator kinerja persentase Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani adalah 92,49% dari target 100% atau tercapai 92,49% atau

bernilai kinerja sangat tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 92,49%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 92,49% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

1. Program Pengembangan Perumahan

Maksud program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Bantul. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan, pengembangan perumahan, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

Indikator kinerja program ini adalah Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Dari 52% target yang ditetapkan pada tahun 2020 tercapai 100% atau 192,31% dari target atau 5.703 unit.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

1) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan;

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunan kebijakan program perumahan. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- a) Identifikasi Kondisi Kekumuhan, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

**Tabel 20.** Data Kawasan Kumuh sesuai Hasil Identifikasi Tahun 2020

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh Benyo Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung Badegan Geblag Serayu Soropaten Gemahan Deresan Bogoran Cepoko Priyan Kweden Taskombang Serut Bolon Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon Karangbendo Wiyoro Pamotan Bodon Singosaren 3 Grojogan Dladan Kragilan Nglaren Salakan Sampang
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak Wanujaya Kidul Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan Kaliputih Banyon

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
				Semail Randubelang Ngireng Ireng Geneng Jaranan Pelemsewu Glugo Glondong Cabean Pandes Ngentak
6	Kasih	40,94	17	Kasongan Jogonalan Lor Jogonalan Kidul Kembaran Jetis Brajan Kasih Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh Bakal Dukuh Sukoharjo Pereng Wetan Jaten Plawonan Watu
Total		330,26	159	

b) Update data kondisi Jalan Desa dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 21.** Data Kondisi Jalan Desa Tahun 2020



No	Uraian	Jumlah (km)	Persentase
1	Kondisi Mantap	457.943	80.62
	Baik	372.436	65.57
	Sedang	85.507	15.05
2	Kondisi Tidak Mantap	110.097	19.38
	Rusak Ringan	48.19	8.48
	Rusak Berat	61.907	10.90
Total		568.04	100

2) Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan perumahan;

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi terhadap penerbitan rekomendasi dan izin pengembangan perumahan. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi pengembangan perumahan dengan data rekomendasi pengembangan perumahan yang terbit sebanyak 12 buah dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

**Tabel 22.** Data Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Perumahan (*Siteplan*) Tahun 2020

No	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi
1	PT. Mekarjaya Land	Perum. Mutiara Sewon 2	Dusun Dobalan, Timbulharjo, Sewon
2	PT. Fortuna Buana Realindo	Perum. Fortuna Mansion Wonokromo	Jati, Wonokromo, Pleret
3	PT. Driharta Kertagriya Arthaka	Perum. Arthaka Village	Sindet, Trimulyo, Jetis
4	PT. Sinar Wijoyo Sulistyoyo	Perum. Griya Sedayu Selaras 2	Dumpeh, Argodadi, Sedayu
5	PT. Mugi Mukti Mulia	Perum. Mukti Banguntapan Residence 2	Bintaran, Ponegaran, Jambidan, Banguntapan
6	PT. Graha Wijaya Land	Perum. Villa Argomulyo	Kaliurang, Argomulyo, Sedayu

7	PT. Bumi Arofatus Selaras	Perum. Cluster Triwidadi	Gampeng, Pajangan, Triwidadi,
8	PT. Merapi Arsita Graha	Perum. Griya Kuantan Amarta	Ngewotan, Ngestiharjo, Kasihan
9	PT. Bintang Family Land	Perum. Bintang Family Residence	Cikalan, Bangunjiwo, Kasihan
10	PT. Hoki Jaya Properti	Perum. Puri Nirwana Bangunjiwo	Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan,
11	PT. Jayaland Sejahtera	Perum. Greenland Giwangan	Tobangan Raya, Wonokromo, Pleret
12	PT. Saraswanti Hasil Makmur	Perum. Royal Tamansari	Dusun Bungsing, Kal. Guwosari, Kecamatan Pajangan

- 3) Kegiatan Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitas terhadap penerima manfaat bantuan stimulasi pembangunan rumah swadaya melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebesar 138 unit Rumah Tidak Layak Huni dientaskan menjadi Rumah Layak Huni dengan rincian seperti pada Tabel.

**Tabel 23.** Data Penanganan RTLH Tahun 2020

No	Kapanewon	Kal.	Jumlah Penanganan (Unit)
1	Pleret	Bawuran	23
		Segoroyoso	58
		Wonokromo	24
		Wonolelo	33
Jumlah			138

- 4) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Tujuan kegiatan ini adalah operasional UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permakaman (RSP). Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD RSP dan semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan jaringan air limbah yang sudah tersambung ke IPAL Terpusat, dan sewa tanah kas desa.

Pada kegiatan ini dihasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sewa hunian Rusunawa dan retribusi pengolahan limbah cair dengan rincian seperti Tabel berikut :

**Tabel 24.** Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rusunawa dan Pengolahan Limbah Cair

No	Tahun	Jumlah PAD (Rp)	
		Retribusi Rusunawa	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	2016	942.700.700	83.482.000
2	2017	1.329.898.200	108.009.500
3	2018	1.775.835.400	128.619.000
4	2019	1.824.933.500	134.362.500
5	2020	1.367.354.786	82.608.000

b). Program Lingkungan Sehat Perumahan

Maksud program ini adalah untuk meningkatkan lingkungan sehat perumahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan penanganan pada Kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penanganan Kawasan kumuh. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh, sedangkan fisik konstruksi dianggarkan pada

Tahun Anggaran 2020, akan tetapi mengalami refocusing anggaran. Lokasi Kawasan kumuh di 2 (dua) dusun :

1. Dusun Kweden, Trirenggo, Kec. Bantul (0,91 Ha)  
Rabat Beton 89 Meter; drainase 90 meter
2. Dusun Deresan, ringinharjo, Kec. Bantul (2,47 Ha)  
Rabat Beton 51 Meter; paving block beton 95 M2

c). Program pengelolaan areal pemakaman

Maksud program ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan areal pemakaman di wilayah TPU Imogiri. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pada TPU Imogiri. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan liang lahat di TPU Imogiri sebanyak 20 unit liang lahat.

d). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Maksud program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan air minum dan air limbah. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan dan genangan air hujan.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan prasarana pengelolaan air limbah dan drainase dengan output kegiatan berupa :

- (a) Pembangunan IPAL Komunal pada 6 lokasi yaitu di Kal. Trimurti Kapanewon Srandakan, Kal. Sumber Agung Kapanewon Jetis, Kal. Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kal. Wonokromo Kapanewon Pleret, Kal. Tamanan Kapanewon Banguntapan, dan Kal. Panggunharjo Kapanewon Sewon.
- (b) Pembangunan saluran drainase/air hujan di 22 lokasi tersebar di Kabupaten Bantul seperti pada Tabel berikut ini :

**Tabel 25.** Lokasi Pembangunan saluran drainase/air hujan Tahun 2020

No	Kapanewon	Volume Kegiatan	Keterangan
1	Banguntapan	3 Lokasi	Drainase Sarirejo 2 Banguntapan, Drainase dan Paving Tegalkopen RT 20 Wonocatur Banguntapan, Drainase Jambidan Banguntapan
2	Sedayu	1 Lokasi	Drainase Argodadi Sedayu
3	Kasih	5 Lokasi	Drainase Ngestiharjo Kasihan, Drainase Tamantirto, Drainase Jetis RT 3 Tamantirto Kasihan, Drainase Janten Ngestiharjo Kasihan, Drainase Cebongan Kadipiro Pedukuhan 5
4	Sanden	2 Lokasi	Drainase Murtigading, Drainase Srigading Sanden
5	Srandakan	2 Lokasi	Drainase Poncosari,

No	Kapanewon	Volume Kegiatan	Keterangan
			Bangket & Drainase Ds Sawahan Trimurti Srandakan
6	Imogiri	2 Lokasi	Drainase Imogiri, Drainase Wukirsari Imogiri
7	Kretek	2 Lokasi	Drainase Tirtosari Kretek, Drainase Donotirto Kretek
8	Piyungan	1 Lokasi	Drainase Monggang Sitimulyo
9	Sewon	2 Lokasi	Drainase Dusun Sudimoro RT 02 Timbulharjo, Drainase / Bangket jl Ds Bakung RT 01 Bangunharjo
10	Pleret	1 Lokasi	Drainase Pleret
11	Bantul	1 Lokasi	Drainase Bantul, Bantul

- (c) Operasi dan pemeliharaan saluran drainase dengan lokasi seperti pada tabel berikut :

**Tabel 26.** Lokasi Pemeliharaan Saluran Drainase Tahun 2020

No	Kapanewon	Volume Pekerjaan (m)	Keterangan
1	Bantul	530	Komplek Perkantoran Manding; Puskesmas Bantul II; Lapangan Paseban; Simpang lima Bejen
2	Sanden	150	Dusun Piring, Murtigading; Kecamatan Sanden
3	Jetis	300	Perempatan Kecamatan Jetis; Dusun Paker, Patalan
4	Pleret	370	Segoroyoso, Pleret; Komplek Pasar Pleret

No	Kapanewon	Volume Pekerjaan (m)	Keterangan
5	Kasihani	200	Dusun Karangjati, Kasihan; Dusun Bangunjiwo, Kembaran, Ngestiharjo
6	Imogiri	80	Pasar Imogiri baru
7	Srandakan	250	Lapangan Trimurti
8	Banguntapan	50	Kecamatan Banguntapan
Total		1.940	

2) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyediaan, peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (a) Peningkatan dan Perluasan SPAM Perdesaan melalui dana DAK yaitu meliputi Peningkatan SPAM Seloharjo, Peningkatan SPAM Mangunan, Peningkatan SPAM Srimulyo, Perluasan SPAM Girirejo
- (b) Peningkatan dan Perluasan SPAM Perkotaan melalui dana DAK yaitu meliputi Perluasan SPAM Banguntapan, Perluasan SPAM Bangunharjo, Perluasan SPAM Tamantirto, Perluasan SPAM Ngestiharjo dan Perluasan SPAM Argomulyo.

e). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Maksud dari program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan dan pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan infrastruktur jalan desa. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan khususnya jalan desa. Anggaran program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan sebesar Rp10.311.740.000,- terealisasi sebesar Rp10.190.126.700,- atau tercapai 98,82%.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan dan rehabilitasi jalan desa. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan dan rehabilitasi jalan desa sebanyak 46 ruas dengan rincian seperti pada tabel berikut :

**Tabel 27.** Lokasi Pembangunan Jalan Desa Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Penanganan (ruas)	Keterangan
1	Sanden	4	Kali jurang- Bonggalan, Kal. Srigading Jalan Sanden Kalimundu, Ruas Jalan D.183, Kal. Gadingharjo Jalan Sanden – Kranggan Jalan Pranti - Cubung
2	Kretek	3	Jalan Jonggahan – Gaten Jalan Guyangan – Depok Jalan Kintelan - Kintelan
3	Pundong	1	Jalan Piring - Ganjuran
4	Bambanglipuro	2	Jalan Tulasan - Ngambah D.320, Kal. Mulyodadi Jalan Turi - Glodogan
5	Pandak	4	Jalan Kuroboyo – Ciren Jalan Kauman – Gunungkelir Jalan Jodog – Dagaran



No	Kapanewon	Jumlah Penanganan (ruas)	Keterangan
			Jalan Jalakan - Jalakan
6	Pajangan	4	Gorong-gorong Jalan Karangber – Santan Jalan Dukuh – Gemahan Jalan Selo – Bungsing Jalan Gupakwarak - Dadabong
7	Bantul	4	Jalan Banjarharjo – Sanggrahan Jalan Priyan – Nogosari Jalan ATM Manding - Manding Tengah Jalan Cepor - Peni
8	Jetis	3	Jalan Bangi – Jetis Jalan Pranti – Wonolopo Jalan Bobok - Kategan
9	Imogiri	3	Jalan Karang Kulon - Kedung Buweng D.480 Talud Jalan Trukan – Pelemadu Talud Jalan Dengkeng - Plencing
10	Dlingo	2	Jalan Terong Lor - Terong Kidul Jalan Gunung Cilik - Munthuk
11	Pleret	7	Jalan Keputren – Pungkuran Jalan Tegalsari - Bawukan Satu D.402 Jalan Cegokan – Kedungrejo Jalan Purworejo – Kedungwalikukun Jalan Purworejo – Ploso Jalan Keputren – Pleret Jalan Bawuran - Bojong
12	Sewon	1	Jalan Ngireng - ngireng Jetak D.226 Kal. Bangunharjo
13	Kasihan	3	Jalan Winongo Glondong – Tirtonirmolo Jalan Brajan - Tamantirto D.82 Talud Jalan Dongkelan - Dongkelan
14	Sedayu	5	Jalan Padusan – Sedayu Jalan Sedayu - Bandut Lor

No	Kapanewon	Jumlah Penanganan (ruas)	Keterangan
			Jalan Samben - Batas Kab Sleman Jalan Panggang – Kedungdengkeng Drainase Jalan Pedes - Tegalrejo
	Total	46 ruas	

#### 4. Sasaran 4 : Meningkatnya penanganan banjir

##### Persentase penanganan banjir

Topografi Kabupaten Bantul dengan bentukan alamnya secara alami menciptakan kawasan potensi banjir genangan maupun banjir luapan. Adanya aktifitas manusia yang mengubah alam mempunyai efek samping antara lain menghambat fungsi drainase sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Untuk mengetahui capaian untuk sasaran ini melalui indikator yaitu seberapa besar pengurangan luas potensi banjir. Apabila potensi luasan banjir makin berkurang maka mengindikasikan tercapainya sasaran ini. Capaian penanganan banjir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 28.** Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penanganan banjir	34	40,9	40,9	100	47,68	86,64

Capaian indikator kinerja persentase penanganan banjir adalah 41,31% dari target 41,31% atau tercapai 101% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 34% maka capaian tahun 2020 naik 6,9%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 47,68% maka capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 86,64% dari target akhir Renstra tahun 2021. Realisasi capaian indikator penanganan banjir tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari Program Pengendalian Banjir melalui Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.836.875.000,- dengan realisasi Rp7.622.246.497,- atau tercapai 97,26% dengan efisiensi sebesar Rp214.628.503,-.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pembangunan atau perkuatan tebing sungai dan peningkatan afvour dengan output kegiatan berupa :

(a) Perkuatan tebing sungai sebanyak 6 paket yaitu :

- Tebing Sungai Widuri, Kal. Ngestiharjo Kapanewon

Kasih

- Tebing Sungai Kontheng, Kal. Argorejo Kapanewon Sedayu
- Tebing Sungai Celeng, Kal. Wukirsari Kapanewon Imogiri
- Tebing Sungai Pesing, Kal. Bawuran Kapanewon Pleret
- Tebing Sungai Krinjing, Kal. Selopamioro Kapanewon Imogiri dan
- Tebing Sungai Winongo Kal. Panggungharjo Kapanewon Sewon

(b) Peningkatan afvour sebanyak 33 paket pekerjaan seperti pada Tabel berikut ;

**Tabel 29** Lokasi Peningkatan Afvour Tahun 2020

No	Kapanewon	Lokasi Peningkatan Afvour
1	Kretek	Afvour Sital Afvour Blantik Afvour Blado
2	Pundong	Afvour Tangkil Afvour Jetis Panjangrejo Afvour Dempet Afvour Bobok Tempel
3	Bambanglipuro	Afvour Cangkring Afvour Kedungpring Afvour Plumutan Afvour Kembangan
4	Pajangan	Afvour Dukuh Guwosari
5	Bantul	Afvour Bogoran Afvour Sutran Sabdodadi

No	Kapanewon	Lokasi Peningkatan Afvour
6	Jetis	Afvour Jetis Patalan
7	Imogiri	Afvour Nogosari 1 Wukirsari Afvour Karangkulon
8	Banguntapan	Afvour Tamanan Afvour Kepuh Wetan Afvour Nitiprayan Afvour Glagah Tamanan
9	Pleret	Afvour Pungkuran Pleret
10	Piyungan	Afvour Kabrekan Srimulyo Afvour Bebekan Srimulyo
11	Sewon	Afvour Prancak Afvour Ngimbang Afvour Bangeran Afvour Ngasem Afvour Sorogenen Timbulharjo Afvour Kagrokan Afvour Mredo Afvour Mrisi Afvour Ngireng - Ireng

Permasalahan :

Dari empat sasaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul secara umum berkaitan dengan fisik konstruksi, sehingga permasalahan yang timbul hampir sama. Antara lain:

1. Banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten bukan kelasnya, sehingga mengurangi umur konstruksi jalan kabupaten terutama di jalur jalur penambangan galian C.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang telah terbangun
3. Pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga perlu didukung oleh tenaga terampil yang bersertifikat.

4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga tidak bisa menjangkau seluruh kerusakan yang ada

#### Solusi

Dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :

1. Prioritas pembangunan infrastruktur untuk penanganan dampak banjir tahun 2017 dan mengusulkan kepada pemerintah propinsi/pusat untuk penanganan dampak banjir sesuai dengan kewenangannya.
2. Peningkatan struktur jalan pada jalur yang dilalui angkutan penambangan galian C.
3. Sosialisasi pada masyarakat untuk ikut menjaga kondisi infrastruktur yang ada
4. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi
5. Koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya:

1. Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.

4. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana peningkatan infrastruktur.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp.89.270.202.500,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.81.313.989.534,00 atau sebesar 90,10%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 30.** Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	39.000.633.293	47,96
2	Meningkatnya kecukupan air irigasi	9.500.388.326	11,68
3	Meningkatnya penanganan banjir	7.622.246.497	9,37
4	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	19.535.079.572	24,02
Jumlah		75.658.347.688	93,04
Belanja Langsung Pendukung		5.655.641.846	6,96
Total Belanja Langsung		81.313.989.534	100

Sumber : DPUPKP, 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.75.658.347.688,00 atau sebesar 93,04% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp5.655.641.846,00 atau sebesar 6,96% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dengan besaran anggaran 47,96% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya penanganan banjir sebesar 9,37% dari total anggaran belanja langsung.



Penyerapan belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 91,10% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 84,75%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,34%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani sebesar 97,32%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 87,66%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 97,32% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik menyerap anggaran terkecil yaitu 88,13% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel 31** Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75,58	75,42	99,79	40.038.813.978	35.099.093.493	87,66
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	82	84	100	4.216.873.500	3.901.539.800	92,52
3	Persentase kecukupan air irigasi	82,66	80,01	96,79	10.813.790.000	9.500.388.326	87,85
4	Persentase penanganan banjir	40,9	41,31	101	7.836.875.000	7.622.246.497	97,26
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	100	92,49	92,49	20.073.597.022	19.535.079.572	97,32

Sumber : DPUPKP, 2021

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 8,91%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 8,82%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,09%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 12,34%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani sebesar 2,68%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 11,87% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 2,68% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel 32.** Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	40.038.813.978	35.099.093.493	4.939.720.485	12,34
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	4.216.873.500	3.901.539.800	315.333.700	7,48
3	Persentase kecukupan air irigasi	10.813.790.000	9.500.388.326	1.313.401.674	12,15
4	Persentase penanganan banjir	7.836.875.000	7.622.246.497	214.628.503	2,74
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	20.073.597.022	19.535.079.572	538.517.450	2,68
	Jumlah	82.979.949.500	75.658.347.688	7.321.601.812	8,82
	Belanja Langsung Pendukung	6.290.253.000	5.655.641.846	634.611.154	10,09
	Total Belanja langsung	9.270.202.500	7.956.212.966	1.313.989.534	8,91

Sumber : DPUPKP, 2021

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak empat sasaran, lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target atau rata-rata tercapai sebesar 97,81% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari

**Pemerintah Kabupaten Bantul**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten**  
**Bantul**

**Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul DI Yogyakarta Kode Pos 55713**

**Telp / Fax . (0274) 367310**

**Website: <http://www.dpupkp.bantulkab.go.id> I Email : [dinas.pupkp@bantulkab.go.id](mailto:dinas.pupkp@bantulkab.go.id)**

